

BAB III

KIPRAH SAM RATULANGI DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1924-1945

3.1 Kiprah Sam Ratulangi Pada Masa Kolonial Belanda

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di Eropa dan kembali ke Indonesia pada tahun 1919, Sam Ratulangi tidak serta-merta terjun ke pergerakan nasional. Ia lebih dahulu menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat Minahasa, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Salah satu bentuk konkret perjuangannya adalah ketika ia diangkat sebagai sekretaris Minahasa Raad (Dewan Minahasa) pada 1924–1927.⁶⁶ Dalam jabatan tersebut ia mulai terlibat secara aktif dalam bidang politik dan pembangunan daerah. Dengan kemampuan dan pengalamannya ia berupaya memberikan perubahan nyata bagi masyarakat Minahasa.

Pencapaiannya yang penting adalah penghapusan kerja paksa (*rodi*) yang selama ini membebani rakyat. Selain itu, ia membuka wilayah transmigrasi baru di daerah Modinding dan Kanarom Selatan yang berbatasan dengan wilayah Bolaang Mongondow. Penduduk dari daerah Minahasa Tengah yang padat dipindahkan ke wilayah tersebut agar memiliki kesempatan hidup yang lebih layak.⁶⁷ Langkah ini turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sam Ratulangi juga mengajak sejumlah dermawan untuk mendirikan yayasan dana belajar. Ia kemudian terpilih sebagai ketua yayasan tersebut. Melalui

⁶⁶ Sutrisno, Kutojo. *Seri Pahlawan Dr. G.S.S.J. Ratulangi: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 1982, hlm: 28

⁶⁷ Sutrisno, Kutojo, *Op cit*, hlm. 28-29

yayasan ini, para pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu secara ekonomi mendapatkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Ia juga membantu para petani kelapa dengan membentuk Serikat Penanaman Kelapa. Tujuannya adalah melindungi petani kelapa dari tindakan para tengkulak atau pengijon yang sering merugikan mereka secara ekonomi. Serikat ini memberikan perlindungan sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam menjual hasil panen.⁶⁸

Berbagai upaya tersebut menunjukkan kepedulian Sam Ratulangi terhadap kesejahteraan masyarakat Minahasa. Gagasan dan tindakan nyatanya membuat ia semakin dikenal dan dihormati oleh rakyat di daerahnya. Sebagai seorang Kristen, Sam Ratulangi juga aktif dalam kehidupan keagamaan. Ia pernah memimpin organisasi Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian gereja di Minahasa. Di bawah kepemimpinannya, KGPM berhasil memperjuangkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kebaktian, menggantikan bahasa Belanda yang sebelumnya digunakan.⁶⁹

Sam Ratulangi mulai menapaki dunia pergerakan kebangsaan melalui aktivitasnya di organisasi *Jong Minahasa*, sebuah wadah bagi kaum muda Minahasa yang berkembang di awal abad ke-20. Organisasi ini menjadi sarana awal untuk menyadarkan identitas kebangsaan, khususnya di kalangan pelajar dan intelektual muda. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, disebutkan bahwa *Jong Minahasa* termasuk dalam barisan awal organisasi pemuda yang kemudian membentuk fondasi pergerakan nasional bersama dengan *Jong Java*,

⁶⁸ *Loc cit*, hlm. 29

⁶⁹ *Loc cit*, hlm. 29

Jong Sumatranen Bond dan organisasi lainnya.⁷⁰ Organisasi *Jong Minahasa* menjadi bagian dari fondasi pergerakan nasional yang melibatkan berbagai elemen pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Semangat pendidikan politik yang dibawa oleh Sam Ratulangi sejajar dengan tokoh-tokoh intelektual pribumi lainnya, seperti Dr. Abdul Rivai, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Dr. Kayadoe. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada 23 November 1922, dijelaskan bagaimana tokoh-tokoh ini berperan sebagai juru bicara bagi daerah masing-masing dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat. Seperti Sam Ratulangi yang berbicara untuk Minahasa, Dr. Kayadoe menyuarakan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk aktif memperjuangkan hak-haknya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, terlibat dalam politik secara terbuka dan mengatasi ketakutan terhadap represi kolonial. Gagasan Kayadoe mengenai Indonesia Raya sejalan dengan visi Sam Ratulangi dan tokoh-tokoh lainnya yang ingin membangun negara merdeka berdasarkan persatuan.⁷¹

Peran Sam Ratulangi dalam pendidikan politik dan jaringan intelektual memberikan kontribusi terhadap fondasi ideologis perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan *the great man theory* yang menyatakan bahwa manusia besar seperti percikan api yang membakar kayu bakar kemudian meledak dan mengubah sejarah dalam waktu singkat.⁷² Sam Ratulangi dikenal sebagai pemimpin yang berperan di daerah dan juga dalam membangun semangat nasionalisme

⁷⁰ Ahmadin, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Jakarta: Rayhan Intermedia, 2017, hlm. 34–36.

⁷¹ *Nieuwsbladen op Java*, Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers. (1922). No. 48/1922: *Nieuwsbladen op Java*. Boedi-Oetomo (Maleische Editie), van 13 t/m 24 November 1922, Nrs. 131 t/m 136., hlm. 409-410

⁷² Esha, Muhammad In'am. *Reaktualisasi "Kepemimpinan Klasik" di Era Demokrasi Deliberatif*. El-Qudwah, 10, 1-14, 2014, hlm. 5

Indonesia. Ia mendorong kemerdekaan dengan mencerdaskan masyarakat, mengajak rakyat berjuang bersama secara sadar dan terarah.

Kongres Pemuda Pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dipimpin oleh Moh. Tabrani menghasilkan tokoh-tokoh terkenal seperti Ir. Sukarno, Abdullah Sigit, dr. Sukiman dari *Jong Java*, Amir Sjarifuddin dan STG. Mulia dari *Jong Batak*, Moh. Hatta dan Moh. Yamin dari *Jong Sumatranen Bond*, Arnol Mononutu dari *Jong Celebes*, Sam Ratulangi dari *Jong Minahasa*, Herman Johannes dari *Tomoresche Jongeren Bond*, Moh. Husni Thamrin dari *Pemuda Kaum Betawi*, J. Leimena dari *Jong Ambon*. Namun dengan adanya semangat kedaerahan yang masih dipertahankan dengan kuat menyebabkan kongres tersebut belum menghasilkan kebulatan pendapat, terutama mengenai masalah '*fusi*' (penggabungan) organisasi pemuda menjadi satu wadah dan masalah 'Bahasa Persatuan'.⁷³ Gagalnya kongres ini dalam menyepakati Bahasa Persatuan mencerminkan bahwa kesadaran nasional belum sepenuhnya tumbuh secara bersama karena kesetiaan terhadap suku atau etnis lebih dominan daripada kesadaran berbangsa.

Kehadiran Sam Ratulangi dalam Kongres Pemuda Pertama tahun 1926 bukan sekadar sebagai peserta pasif, melainkan sebagai wakil dari organisasi *Jong Minahasa* yang aktif memberikan pandangan dari Indonesia bagian timur. Dalam forum tersebut, Sam Ratulangi menyampaikan keprihatinannya atas dominasi pemuda dari wilayah Jawa dan Sumatera dalam wacana kebangsaan. Ia menekankan pentingnya memasukkan identitas dan aspirasi daerah-daerah di luar

⁷³ Esha, Muhammad In'am, *Op cit*, hlm. 49

Jawa sebagai bagian tak terpisahkan dari semangat nasionalisme Indonesia. Pandangannya ini menjadi sangat penting karena saat itu banyak pemuda dari luar Jawa yang merasa termarginalkan dalam perumusan ide persatuan bangsa. Dengan pemikiran yang kuat dan pengalaman organisasinya, Sam Ratulangi berhasil mempengaruhi jalannya diskusi dan mendorong semangat keterbukaan dalam nasionalisme pemuda. Ia menjembatani kesenjangan pendapat dari setiap perwakilan daerah yang hadir di kongres tersebut dengan menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia harus menjadi cita-cita bersama semua suku dan daerah, bukan milik kelompok mayoritas semata.”⁷⁴

Pada tanggal 16 Agustus 1927, Sam Ratulangi bersama Dr. Tumbelaka mendirikan Partai Persatuan Minahasa. Partai ini sebenarnya merupakan pecahan dari Perserikatan Minahasa, organisasi politik yang telah berdiri sejak tahun 1916.⁷⁵ Awalnya, Partai Persatuan Minahasa bersifat lokal dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Minahasa. Seiring waktu, partai ini berkembang menjadi organisasi yang bersifat nasional dan mulai bekerja sama dengan partai-partai kebangsaan lainnya. Partai Persatuan Minahasa kemudian bergabung dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI), sebuah aliansi politik yang dikenal karena memperjuangkan tuntutan “Indonesia Berparlemen”.⁷⁶

Strategi perjuangan Sam Ratulangi pada masa itu dinilai tepat. Jika sejak awal partai yang ia pimpin secara terang-terangan menyatakan tujuan politiknya,

⁷⁴ Lihat Masjkuri, Dr. G.S.S.J. Ratulangi (Jakarta: Depdikbud, 1985), hlm. 44–45; lihat juga Sutrisno Kutoyo, *Seri Pahlawan Nasional: Dr. GSSJ Ratulangi* (Jakarta: Departemen Sosial RI, 1993), hlm. 36.

⁷⁵ J.TH. Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging In Nederlansch-Indie*. 1931., hlm. 306-307

⁷⁶ Sutrisno, Kutojo. *Seri Pahlawan Dr. G.S.S.J. Ratulangi: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 1982, hlm: 30

kemungkinan besar pemerintah Hindia Belanda akan langsung dibubarkan. Selain aktif di bidang politik, Sam Ratulangi juga tidak tinggal diam melihat ketimpangan sosial. Jika ada kelompok masyarakat yang tertindas oleh kelompok lain, ia akan berpihak kepada mereka yang lemah. Bagi Sam Ratulangi, keadilan sosial dan kemanusiaan harus diperjuangkan oleh siapa pun yang peduli pada nasib bangsanya.⁷⁷

Menurut teori nasionalisme, peran Sam Ratulangi menunjukkan bentuk nasionalisme yang berlandaskan cita-cita bersama yaitu pandangan bahwa identitas kebangsaan terbentuk melalui komitmen terhadap tujuan bersama, bukan karena kesamaan asal-usul atau budaya. Keterlibatannya mencerminkan upaya membangun solidaritas nasional yang menjadi dasar perjuangannya dalam menyatukan rakyat dari latar belakang budaya yang berbeda menuju kemerdekaan Indonesia.

Tahun 1927, rakyat Minahasa memilih Sam Ratulangi sebagai wakil mereka di *Volksraad* (Dewan Rakyat). Saat itu perjuangan bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian dan mendekati puncaknya. Dalam setiap pidatonya Sam Ratulangi mengecam ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia dan menuntut kesetaraan hak. Perjuangannya mencerminkan komitmennya terhadap prinsip keadilan sosial dan nasionalisme.⁷⁸ Hal ini mencerminkan bentuk nasionalisme yang lahir dari kesadaran terhadap ketertindasan dan bertujuan

⁷⁷ Sutrisno, Kutojo. *Seri Pahlawan Dr. G.S.S.J. Ratulangi: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 1982, hlm: 30

⁷⁸ Sutrisno, Kutojo, *Op cit*, hlm: 33

membebaskan masyarakat dari struktur kolonial yang menindas⁷⁹. Sam Ratulangi melihat bangsa sebagai kesatuan budaya sekaligus komunitas politik yang setara, semua warga berhak atas keadilan dan martabat yang sama.

Dalam laporan De Java Post tertanggal 5 Agustus 1927, tercatat diskusi di *Volksraad* mengenai penguatan militer di Hindia Belanda. Sam Ratulangi tampil aktif dengan mengajukan mosi agar prajurit pribumi diberi akses masuk ke Sekolah Kader Militer di Magelang sebuah langkah penting untuk mendorong kesetaraan dalam struktur militer kolonial. Mosi tersebut akhirnya disetujui, menunjukkan efektivitas pendekatan diplomatis Sam Ratulangi dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya perhatian terhadap kebutuhan rohani prajurit, termasuk bagi kelompok Muslim. Dalam forum yang sama, sejumlah tokoh kolonial memperdebatkan peran rohaniwan militer, namun Sam Ratulangi tetap konsisten memperjuangkan kepentingan sosial dan spiritual prajurit pribumi.⁸⁰ Peran ini mencerminkan komitmen Sam Ratulangi terhadap nasionalisme yang tidak hanya simbolik, melainkan diwujudkan melalui perjuangan legislatif yang sistematis dan berani.

Sikap kritis Sam Ratulangi terhadap kebijakan kolonial menimbulkan ketegangan dengan pihak berwenang. Sam Ratulangi pernah dipenjara selama empat bulan dan diberhentikan dari keanggotaan *Volksraad* selama tiga tahun. Setelah dibebaskan, Sam Ratulangi tidak mundur dari perjuangannya dia mendirikan majalah mingguan berbahasa Belanda *Nationale Commentaren* yang menjadi *platform* untuk menyuarakan pandangan politiknya dan memperjuangkan

⁷⁹ Smith, A.D. *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*. Jakarta: Erlangga, 2003.

⁸⁰ De Java Post. (1927, 5 Agustus). *Kindertoelag*. *De Java Post*, 25(31), hlm. 456.

hak-hak rakyat Indonesia.⁸¹ Strategi ini menunjukkan bahwa nasionalisme tidak selalu diwujudkan melalui aksi fisik, melainkan juga melalui pembentukan opini publik dan perjuangan di medan diplomasi.

Dukungan Sam Ratulangi terhadap Petisi Soetardjo yang diajukan pada 15 Juli 1936 memperlihatkan konsistensinya dalam mendorong transformasi politik secara konstitusional dan damai. Petisi ini, yang diusulkan oleh Soetardjo Kartohadikusumo kepada *Volksraad* (Dewan Rakyat), meminta agar diberikan kemerdekaan bagi Indonesia dalam waktu sepuluh tahun meskipun tetap berada dalam kerangka Kerajaan Belanda sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Grondwet*. Usulan tersebut menekankan pentingnya pemberian otonomi yang lebih luas agar bangsa Indonesia dapat mempersiapkan pemerintahan sendiri secara bertahap dan beradab tanpa memutuskan hubungan langsung dengan Belanda. Sam Ratulangi bersama tokoh lain seperti I.J. Kasimo melihat petisi ini sebagai langkah kompromistis namun strategis dalam mengupayakan persamaan hak dan kemandirian bagi rakyat pribumi.⁸² Sam Ratulangi memberikan dukungan pada Petisi Soetardjo mencerminkan nasionalisme yang menekankan kesamaan hak politik dan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip bersama, bukan kesamaan etnis atau asal-usul.

Memasuki periode awal 1940-an, Sam Ratulangi semakin menegaskan posisinya sebagai tokoh nasional yang kritis terhadap ketidakadilan struktural

⁸¹ LearnIn "Profil Tokoh Pers Indonesia | Dr G.S.S.J Ratulangi," diakses 19 April 2025, <https://learn.infiltran.com/2017/10/25/profil-tokoh-pers-indonesia-dr-g-s-s-j-ratulangi/>

⁸² Susanto Zuhdi, dkk. *A Century Of Parliamentary Life In Indonesia History Of The House Of Representatives Of The Republic Of Indonesia*. Jakarta: The Secretariat General Of The House Of Representatives Of The Republic Of Indonesia, 2021, hlm. 40

dalam sistem hukum kolonial. Salah satu bentuk kritiknya diarahkan pada Pasal 161 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda, yang melarang aksi mogok kerja oleh buruh dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi. Dalam pandangan Sam Ratulangi, pasal ini bersifat timpang karena tidak memberikan sanksi serupa kepada pengusaha yang justru kerap menjadi penyebab keresahan melalui kebijakan kerja yang eksploitatif. Ia menyoroti absennya perlindungan hukum terhadap kelangsungan kerja dan kesejahteraan buruh, sementara kepentingan pengusaha tetap diistimewakan. Oleh karena itu, ia mendorong agar pasal tersebut dihapus atau direvisi menjadi lebih adil dan dapat diterapkan secara konsisten tanpa memihak.⁸³

Berbagai publikasi serta surat kabar memberitakan Sam Ratulangi diposisikan sebagai *Vertrouwensman* yakni orang kepercayaan pemerintah kolonial. Hal ini tercermin dengan jelas dalam artikel *De Kwestie Dr. Ratulangi* yang terbit di *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië* pada tahun 1942.⁸⁴ *The great man theory*, menjelaskan posisi ini mencerminkan kapasitas individual Sam Ratulangi sebagai tokoh luar biasa yang mampu memengaruhi arah politik bahkan dari dalam struktur kolonial yang menindas. Karisma, pendidikan tinggi serta kemampuan berkompromi tanpa kehilangan idealisme menjadikannya sosok pemimpin yang memainkan peran krusial dalam masa transisi menuju kemerdekaan.

⁸³ Vereenigingen van Gezagvoerders & Stuurlieden en Scheepswerktuigkundigen in Ned.-Indië. *Request aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië: Bepleitende nadere voorzieningen in verband met art. 161 bis Ind. W.v.S. Ned.-Indië*: Vereenigingen van Gezagvoerders & Stuurlieden en Scheepswerktuigkundigen, 1940., hlm. 25-26.

⁸⁴ Dr. G.S.S.J. Ratulangi, *De Kwestie Dr. Ratulangi. Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*. 1942, hlm. 4

Istilah *Vertrouwensman* tidak hanya mencerminkan loyalitas, lebih menggambarkan posisi strategis yang diambil oleh Sam Ratulangi untuk menjadi jembatan antara kepentingan rakyat Indonesia dan sistem pemerintahan kolonial. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa Sam Ratulangi menghadapi dilema antara menentang sistem kolonial secara terbuka atau mencoba melakukan perubahan dari dalam. Strategi kedua inilah yang tampaknya dipilih melalui jalur legal, berusaha menyuarkan aspirasi rakyat tanpa kehilangan akses politik di tingkat atas.⁸⁵ Sam Ratulangi tetap konsisten dalam perjuangannya untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat yang sejalan dengan *the gret man theory* bahwa perjuangan kemerdekaan bisa dilakukan lewat diplomasi, negosiasi dan pemikiran yang konsisten dan terarah.

Sam Ratulangi sering kali memiliki pemikiran yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masyarakat Minahasa. Berdasarkan dokumen *De Minahassers en de Indische Beweging*, khususnya bagian "*Penandaan ithceptalle*", masyarakat Minahasa dikenal memiliki identitas sosial yang kuat, dengan nilai-nilai kolektivitas dan kesadaran etnis yang tinggi. Nilai-nilai ini membentuk cara pandang Sam Ratulangi dalam memperjuangkan kemerdekaan, di mana ia menekankan pentingnya membangun kesadaran bersama dan identitas nasional, bukan hanya perjuangan politik dan militer semata.⁸⁶

3.2 Kiprah Sam Ratulangi Pada Masa Pendudukan Jepang

Perang Dunia II meletus di Eropa pada tahun 1939. Pada 10 Mei 1940, Belanda diserbu oleh tentara Jerman, sehingga Ratu Wilhelmina terpaksa

⁸⁵ *ibid*, hlm. 4

⁸⁶ Menara. (1935, November 7). Economische toestand der Minahassa. No. 44. Dr. G.S.S.J. Ratulangi, Voorzitter van de Economische Commissie.

mengungsi ke London. Akibatnya, Hindia Belanda harus berdiri sendiri tanpa bantuan langsung dari pemerintah kolonial di Eropa.⁸⁷

Di tengah kekosongan itu, muncul suara dari kalangan pergerakan nasional yang ingin bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Mereka berharap kerja sama tersebut akan membawa perubahan dan memberikan peluang menuju pemerintahan yang lebih sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Namun, pemerintah Belanda tetap menolak untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Ironisnya, Belanda sendiri sedang dijajah oleh Jerman, tetapi tetap menolak memberi kebebasan kepada bangsa Indonesia. Hal ini melukai perasaan rakyat Indonesia.⁸⁸

Pemerintah Hindia Belanda bahkan menanggapi tuntutan nasional dengan tindakan represif, seperti membatasi rapat umum dan menangkap tokoh-tokoh pergerakan. Pada tahun 1941, beberapa tokoh penting seperti Sam Ratulangi, Muhammad Husni Thamrin, dan Dr. Douwes Dekker (Setiabudi) ditangkap.⁸⁹

Pada Desember 1941, Perang Pasifik dimulai. Jepang melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Pemerintah Hindia Belanda tidak mampu menghadapi serangan ini. Pada Maret 1942, Gubernur Jenderal Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer dan Letnan Jenderal Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Jepang, Imamura, di Kalijati, Jawa Barat.⁹⁰

Awalnya, banyak tokoh Indonesia tertarik pada propaganda Jepang. Jepang mengajak bangsa Indonesia untuk memenangkan “perang suci” dan membangun

⁸⁷ Sutrisno, Kutojo. *Seri Pahlawan Dr. G.S.S.J. Ratulangi: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 1982, hlm: 40

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 40

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 40

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 40

Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Jepang juga membebaskan beberapa tokoh penting seperti Sukarno, Hatta, dan Syahrir. Hal ini disambut gembira oleh rakyat Indonesia.⁹¹

Tahun 1942–1943, Sam Ratulangi tetap tinggal di Jakarta dan bersikap diam terhadap pemerintah militer Jepang. Namun, pada tahun 1943, ia menerima tawaran sebagai penasihat pemerintah militer Jepang di Jakarta. Setahun kemudian, ia dipindahkan ke Ujung Pandang (Makassar) dan menjadi penasihat Angkatan Laut Jepang, yang saat itu menguasai wilayah Indonesia Timur.⁹²

Jepang berharap bisa memanfaatkan pengaruh Sam Ratulangi untuk mendapat simpati rakyat. Namun, pemerintahan Angkatan Laut Jepang tetap bersifat kolonial. Semua tenaga kerja Belanda diganti dengan orang Jepang. Jumlah pejabat sipil Jepang jauh lebih banyak daripada Belanda sebelum perang. Kebebasan politik dan pers tidak ada. Polisi militer Jepang sering bertindak kasar kepada rakyat.⁹³

Sam Ratulangi tetap berupaya menjaga hubungan baik antara rakyat Sulawesi dengan pihak Jepang. Mereka sering mengadakan malam ramah-tamah untuk membangun saling pengertian. Namun, situasi perang membuat semuanya tidak berjalan lama. Rakyat hidup dalam ketakutan karena ancaman dari Jepang dan serangan balik dari Sekutu, khususnya Amerika Serikat.

Dalam situasi ini, Sam Ratulangi memanfaatkan jabatannya untuk membangkitkan semangat persatuan dan harapan akan kemerdekaan. Ia mendirikan

⁹¹ Masjkuri. GSSJ. RATULANGI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985. hlm. 76.

⁹² *ibid*, hlm. 76

⁹³ Sutrisno, Kutojo, *Op cit*, hlm. 41

organisasi Sumber Darah Rakyat (SUDARA) sebagai wadah penyadaran masyarakat. Melalui organisasi ini, ia menyampaikan informasi tentang situasi perang dan pentingnya menjaga persatuan. Ia juga meyakinkan rakyat bahwa kemerdekaan Indonesia pasti akan datang.⁹⁴ SUDARA dapat disamakan dengan organisasi Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) yang dibentuk di Jawa. Ketika pasukan Sekutu yang dipimpin Jenderal MacArthur mulai merebut kembali wilayah dari tangan Jepang, kedudukan Jepang di Indonesia pun melemah. Melihat keadaan yang semakin sulit, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Untuk itu, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

BPUPKI atau *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Badan ini terdiri dari 60 orang, ditambah dengan 6 anggota tambahan. Jepang menunjuk Dr. Radjiman Widyodiningrat sebagai Ketua, sementara dua orang Wakil Ketua ditunjuk, yaitu Ichibangase Yoshio dari kalangan Jepang dan R. P. Soeroso dari kalangan Indonesia. Seluruh anggota BPUPKI dibagi ke dalam beberapa *bunkakai* (kelompok kerja) dan satu Panitia Hukum Dasar. Panitia Hukum Dasar memiliki 19 anggota di bawah pimpinan Ir. Sukarno. Nama panitia ini kemudian diganti menjadi Panitia Undang-Undang Dasar. Sebagai panitia, mereka duduk dalam panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Prof. Mr. Soepomo. Sementara itu, menurut Sobirin Malian jumlah anggota BPUPKI adalah 21 orang yang diketuai oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Ketua, dengan 19 anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari

⁹⁴ *Lok cit*, hlm. 42

Jawa, 3 orang dari Sumatra dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan tersebut ditetapkan berdasarkan maklumat *Gunseikan* Nomor 23 pada 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Tenno Heika.⁹⁵ Menurut teori nasionalisme, pembentukan BPUPKI mencerminkan upaya awal membentuk suatu bangsa dengan keanekaragaman wilayah dan suku menjadi satu dalam wadah kebangsaan yang lebih besar.

BPUPKI kemudian membentuk tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Para tokoh perumus konstitusi tersebut antara lain dr. Radjiman Widyodiningrat, Ki Bagoes Hadikusuma, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetardjo Kartohamidjojo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Moh Amir (dari Sumatra), Mr. Abdul Abbas (dari Sumatra), Sam Ratulangi, Andi Pangerang (dari Sulawesi), Mr. Latuhary, Mr. Pudja (dari Bali), A.H. Hamidan (dari Kalimantan), R.P. Soeroso, Wahid Hasyim, dan Mr. Muh. Hassan (dari Sumatra). Selain itu, ada juga tokoh-tokoh perumus lainnya seperti Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Sukarno.⁹⁶

Pada tahun 1945, Sam Ratulangi ditunjuk sebagai salah satu wakil dari Sulawesi untuk menghadiri sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Jakarta. Ia tergabung dalam delegasi Indonesia Timur bersama tokoh-tokoh penting seperti Andi Sultan Daeng Radja dan Tadjuddin Noor. Kehadiran Sam Ratulangi di forum nasional ini tidak sekadar simbolik, ia aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Sulawesi dan mendorong

⁹⁵ Hasnani Siri, *Op cit hlm.* 297-298

⁹⁶ *Lok cit, hlm.* 298.

agar kepentingan daerah luar Jawa diperhatikan dalam penyusunan dasar negara. Dalam sidang-sidang BPUPKI, Sam Ratulangi secara terbuka menekankan pentingnya persatuan nasional, dengan merangkul semua suku dan agama, terutama dari wilayah timur Indonesia. Ia menyambut baik usulan Pancasila sebagai dasar negara, dan mendorong agar asas persatuan dan keadilan sosial diterapkan dalam sistem pemerintahan.

Salah satu perhatian utama Sam Ratulangi adalah perlunya perwakilan daerah secara proporsional dalam lembaga negara pasca-kemerdekaan. Ia menyadari bahwa tanpa struktur perwakilan yang adil, Indonesia akan berisiko menghadapi ketimpangan antara pusat dan daerah. Pandangan ini kemudian menjadi rujukan penting dalam pembentukan Dewan Perwakilan Daerah pascakemerdekaan. Partisipasi aktifnya dalam BPUPKI mencerminkan komitmen Sam Ratulangi untuk menjadikan kemerdekaan sebagai milik bersama seluruh bangsa Indonesia tidak hanya wilayah Jawa dan Sumatera, tetapi juga seluruh Indonesia.

Pada 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada Sekutu. Namun, pemerintah Jepang tidak berani langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. Tentara Sekutu juga belum tiba untuk melucuti pasukan Jepang di Indonesia. Rakyat Indonesia yang telah lama dijajah tidak ingin kembali bergantung pada bangsa lain. Oleh karena itu, pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya secara mandiri.

Sam Ratulangi berperan aktif sebagai perwakilan Sulawesi bersama Andi Pangerang dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada rapat tanggal 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Ir. Sukarno, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan serta Ir. Sukarno dan Drs. Muhammad Hatta ditetapkan sebagai

Presiden dan Wakil Presiden. Usulan pengangkatan wakil presiden secara resmi didorong oleh Subardjo Sastrosoewirjo dengan mengajukan nama Sam Ratulangi, menunjukkan peran pentingnya dalam proses transisi pemerintahan Indonesia. Namun, dalam rapat pada 18 Agustus 1945, Sam Ratulangi ditunjuk sebagai Gubernur Sulawesi untuk memimpin wilayah tersebut dalam masa awal kemerdekaan, mempertegas kontribusinya dalam pembentukan Republik Indonesia.⁹⁷

⁹⁷ Taulu, H.M. *Pahlawan Nasional DR G.S.S.J. Ratu Langie*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 1964, hlm: 26.